

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad K. 2017. *“Pengaruh Jumlah Penduduk, Kompetisi Politik, Anggaran belanja Modal, Total Kekayaan Daerah, Dan Leverage Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintahan Daerah”*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Anissa A. 2017. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah se-Jawa*. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Alor Dalam Angka*. Alor: BPS Kabupaten Alor
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Badung Dalam Angka*. Badung: BPS Kabupaten Badung
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Batang Dalam Angka*. Batang: BPS Kabupaten Batang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Blitar Dalam Angka*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Ende Dalam Angka*. Ende: BPS Kabupaten Ende
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Indramayu Dalam Angka*. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Jombang Dalam Angka*. Jombang: BPS Kabupaten Jombang
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kediri Dalam Angka*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Klungkung Dalam Angka*. Klungkung: BPS Kabupaten Klungkung
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka*. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Lembata Dalam Angka*. Lembata: BPS Kabupaten Lembata
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Madiun Dalam Angka*. Madiun: BPS Kabupaten Madiun
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Situbondo Dalam Angka*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka*. Sumbawa: BPS Kabupaten Sumbawa
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka*. Timor Tengah Selatan: BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka*. Timor Tengah Utara: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka*. Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Cilegon Dalam Angka*. Cilegon: BPS Kota Cilegon
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: BPS Kota Denpasar
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Depok Dalam Angka*. Depok: BPS Kota Depok
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Mataram Dalam Angka*. Mataram: BPS Kota Mataram
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Pasuruan Dalam Angka*. Pasuruan: BPS Kota Pasuruan
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Probolinggo Dalam Angka*. Probolinggo: BPS Kota Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Serang Dalam Angka*. Serang: BPS Kota Serang
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Surakarta Dalam Angka*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- Caryn Conley, Jennifer Tosti-Kharas. 2014. "Crowdsourcing content analysis for managerial research", *Management Decision*". Vol. 52 Issue: 4, pp.675-688, <https://doi.org/10.1108/MD-03-2012-0156>.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches : fourth edition*. Sage publications, Inc.
- Dwi L. 2017. "*Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Daerah Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2014*". Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Fika F. 2017. "*Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*". Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Garcia-Sanchez, e. a. 2013. *Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government*. *Journal of Cleaner Production* 39, 60-72.
- Hermana, Budi., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W.Silfianti. 2012. *E-government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web*. *3rd International Conference on e-Education, e-Business, e- Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Huwae K. 2016. *Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "*Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.*" Diakses pada 20 Juli 2018.

<http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>

- Jensen, Michael C. dan Meckling. William H. 1976. *“Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”*. Jurnal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, October pp. 305-360.
- Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005. *“Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities.”* Journal of Accounting and Public Policy, vol. 24, issue 2, pp. 101-121.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN: Jakarta.
- Mardiasmo, 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. PAU Studi Ekonomi UGM: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 : 1. (1-17).
- Martani, Dwi., Debby Fitriyani, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60 No.3 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Rahmad D. 2013. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah”*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Redaksi Detiknews. “Warga Magelang demo menuntut transparansi dana retribusi desa”. 2017. Diakses pada 30 Juni 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3576525/warga-magelang-demo-tuntut-transparansi-dana-retribusi-desa>.
- Redaksi Tribun jateng. “Warga Kecipir Losasri Brebes Demo ke DPRD Brebes Tuntut Copot Kades Turmudi”. 2018. Diakses pada 30 Juni 2018. <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/07/warga-kecipir-losasri-brebes-demo-ke-dprd-brebes-tuntut-copot-kades-turmudi>.
- Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
Daerah.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: *“Transparency and
Accountability in Public Financial Administration”*. UN DESA.
- Siti R. 2017. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis
Website Pada Pemerintah Daerah Di Maluku dan Maluku Utara*. Tesis.
Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Syamsul. 2017. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada
Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Tesis. Magister Sains Akuntansi.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.